

## DETERMINAN TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN PADA LAMAN RESMI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2016-2018

Ektrak Puji Lestari, Shiddiq Nur Rahardjo<sup>1</sup>

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

### ABSTRACT

*This research aimed to analyze the effect of components of characteristics, complexity and quality of financial statements on the transparency of regional financial information. The dependent variable in this research is the transparency of regional financial information on the website of regional government in Indonesia in 2016-2018 which is proxied by the accessibility index of the official government website. The sample used in this transparency study was 33 provincial governments for three years in a row. The research hypothesis testing was performed using panel data regression analysis with Eviews 10 software. This research results show that only the OPD variable has a significant effect on the transparency of regional financial information. While the size of the local government, the level of dependency, population and the results of BPK's audit opinion are positively related which do not have a significant influence on the transparency of regional financial information. This research also proves that the number of findings in the regional government financial statements has a negative and not significant effect on transparency on the official website of the local government.*

*Keywords: transparency, official website, local government, financial information*

### PENDAHULUAN

Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dalam mengelola sendiri pemerintahannya atau sering disebut dengan otonomi daerah menyebabkan pemerintah provinsi (Pemprov) memiliki tanggung jawab yang besar dalam keberlangsungan roda pemerintahan, yang juga diiringi dengan adanya peraturan mengenai Perimbangan Keuangan Daerah. Perimbangan keuangan pemerintah provinsi adalah salah satu bentuk pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menjalankan usaha yang bertujuan agar keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah terwujud dalam rangka pelaksanaan *e-government* di Indonesia (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2010). Tata kelola pemerintahan provinsi memiliki sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan keuangan yang wajib dijalankan sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa wujud tanggungjawab sosial dan keterbukaan informasi keuangan, maka pemerintah provinsi mewajibkan perangkatnya terbuka, bertanggungjawab dan melaporkan informasi keuangannya dalam keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan

Keterbukaan informasi publik berupa transparansi informasi keuangan lembaga publik di Indonesia telah dilakukan oleh Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) yang mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa badan publik yang masih belum transparan, sedangkan hal ini sudah dijelaskan pada UU No. 56 Tahun 2005 mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam Pasal 12E dan 13B yang menyatakan bahwa badan publik harus transparan dan menyajikan informasi keuangannya pada laman resminya masing-masing.

---

<sup>1</sup> Corresponding author

Meskipun telah diatur dalam suatu peraturan tertentu masih terdapat badan publik termasuk pemerintah provinsi yang belum mematuhi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang menentukan transparansi informasi keuangan suatu pemprov di Indonesia selama periode 2016-2018.

Penelitian ini memiliki variabel dependen transparansi informasi keuangan pemprov di Indonesia dan variabel independennya meliputi komponen karakteristik, kompleksitas dan kualitas laporan keuangan. Komponen karakteristik pemerintah provinsi meliputi ukuran dan tingkat ketergantungan pemprov terhadap pemerintah pusat, kemudian kompleksitas terdiri dari jumlah penduduk dan jumlah OPD. Sementara, kualitas laporan keuangan meliputi tingkat temuan dan hasil opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

### **KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

Transparansi keuangan pada laman resmi pemerintah daerah provinsi tidak dapat dipisahkan dari teori institusional (*institutional theory*) dan teori keagenan (*agency theory*). Teori institusional menjelaskan bahwa organisasi akan merespon adanya tekanan-tekanan yang berasal dari berbagai pihak dalam konteks institusional mereka yang berupa adopsi pada praktik dan struktur organisasinya. Hal tersebut meliputi tiga mekanisme yang disebut *isomorphism*, diantaranya *coercive*, *mimetic* dan *normative*. Berdasarkan mekanisme tersebut menyebabkan pemerintah daerah melakukan tata kelola yang baik dalam pemerintahannya termasuk keterbukaan informasi publiknya yang bertujuan untuk meningkatkan legitimasi dari para *stakeholders* (Carpenter dan Feroz (2001).

Teori agensi menjelaskan mengenai hubungan antara *principal* dan *agent*. Pemerintah daerah selaku *agent* dan *principal* dalam konteks pemerintahan yaitu masyarakat dan *stakeholder* lainnya, yang dalam pelaksanaannya *agent* harus memberikan informasi simetris kepada *principal*. Hal itu dilakukan karena masyarakat selaku *principal* telah memberikan kewenangan menjalankan roda pemerintahan kepada pemerintah provinsi dan memiliki tanggungjawab dalam menyampaikan hasil kinerjanya kepada publik secara transparan (Afriansyah dan Haryanto, 2013).

### **Pengaruh Ukuran (*Size*) Terhadap Transparansi Pemda Provinsi Di Indonesia**

Studi empiris yang dilakukan Nainggolan dan Purwanti (2016) mengungkapkan bahwa ukuran pemda menggambarkan jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah tersebut. Apabila semakin besar aset yang dimiliki maka besar juga ukuran pemerintah daerahnya. Penelitian sejenis dilakukan oleh Medina (2012) yang menjelaskan mengenai ukuran pemda yang tercermin dalam jumlah aset yang berbanding lurus dengan ketersediaan dan aksesibilitas informasi keuangan di laman pemerintah daerah. Hal itu menunjukkan pemerintah daerah wajib melakukan transparansi kepada para *stakeholder* untuk mempertanggungjawabkan semua pengelolaan aset pemerintah daerah yang ditunjukkan melalui ukuran (*size*) sebagai pengukuran dari karakteristik pemerintah daerah.

Studi empiris yang dilakukan oleh Garcia dan Garcia (2010), ukuran suatu lembaga yang besar menunjukkan adanya asimetri informasi yang besar pula antara manajer dengan *stakeholder* dan menyebabkan *agent cost* menjadi lebih besar. Laswad, *et al.* (2004) dan Styles and Tennyson (2007) menyatakan dengan ketersediaan laporan keuangan di internet lewat situs web pemerintah daerah menunjukkan dokumen laporan keuangan yang tersedia secara online. Oleh karena itu, pemda yang berukuran besar mempunyai tingkat insentif yang lebih kuat untuk meningkatkan reputasi dan *public image* mereka (Ratmono, 2013). Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis pertama penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

*H1: Ukuran (size) berpengaruh positif terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia.*

## **Pengaruh Tingkat Ketergantungan Terhadap Transparansi Pemerintah Daerah Di Indonesia**

Berdasarkan penelitian Robbins dan Austin (1986) dalam Martani, *et al.* (2014) menjelaskan bahwa pendapatan antar pemerintah menggambarkan ketergantungan pemda terhadap pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan perspektif teori institusional yang menyatakan besarnya tingkat ketergantungan setiap pemda yang dapat menyebabkan pemerintah pusat melakukan *coercive isomorphism* dalam rangka pertanggungjawaban dari pemda. Bentuk dari *coercive isomorphism* dapat berupa transparansi pelaporan keuangan melalui laman resmi pemerintah daerah masing-masing.

Menurut Patrick (2007), mendefinisikan *intergovernmental revenue* sebagai pendapatan yang berasal dari transfer yang diberikan pemerintah pusat untuk membiayai program pemda. Konsekuensinya, pemda harus menggunakan transfer tersebut sesuai dengan alokasi dan petunjuk anggaran dan UU. Pemerintah pusat berharap pemda dapat meningkatkan transparansi pengelolaan dana tersebut di website pemerintah daerah sehingga para *stakeholder* lainnya juga mengetahui penggunaan dana transfer pemerintah pusat dan sesuai dengan teori agensi bahwa terdapat keselarasan informasi antar pihak yang menyebabkan tidak terjadinya asimetri informasi yang dipublikasikan. Penelitian Martani, *et al.* (2014) menjelaskan terdapat pengaruh positif antara tingkat ketergantungan dengan transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Hipotesis kedua penelitian ini dirumuskan.

*H2: Tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia*

## **Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Transparansi Pemerintah Daerah Di Indonesia**

Pemda adalah lembaga publik yang memiliki tanggungjawab kepada masyarakat sebagai bagian dalam kompleksitas pemerintahan. Sesuai dengan teori *agency* yang menjelaskan bahwa para pemegang kekuasaan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya tidak diperbolehkan untuk melakukan manipulasi informasi tetapi harus sejalan dengan informasi yang sebenarnya terjadi untuk keberlangsungan hubungan yang baik dengan *stakeholder*. Penelitian terdahulu oleh Afryansyah dan Haryanto (2013) menyebutkan bahwa jumlah penduduk pemda cenderung selaras dengan peningkatan kemajuan teknologi dan informasi suatu daerah, masyarakat yang tinggal di daerah dengan jumlah penduduk yang besar dan lebih modern akan banyak mengandalkan serta menggunakan internet untuk mendapatkan informasi, termasuk didalamnya mengenai informasi tentang kinerja pemerintah daerahnya yang tercermin dari transparansi pemda.

Oleh karena itu, sistem yang efektif bagi pemda dalam pengungkapan informasi finansialnya yaitu melalui laman pemerintah daerah di internet. Sementara menurut penelitian Ingram (1984) menunjukkan bahwa penduduk akan memberikan dukungan untuk Pemda dalam meningkatkan transparansinya kepada publik. Hipotesis ketiga dirumuskan:

*H3: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia*

## **Pengaruh Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terhadap Transparansi Pemerintah Daerah Di Indonesia**

Pemerintah daerah provinsi memiliki sejumlah perangkat daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan berbagai aktivitas atau program yang telah dirancang termasuk dalam persiapan dan penyusunan LKPD. Menurut Hilmi dan Martani (2012) menyatakan bahwa semakin kompleks pemerintahan dalam melaksanakan programnya maka selaras dengan semakin besar pula transparansi pada laman pemerintah daerah dan membantu pembaca dalam memahami kompleksitas program yang dilakukan Pemda.

Mandasari (2009) dalam Khasanah (2014) menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah OPD maka informasi yang harus diungkapkan Pemda semakin banyak pula dan sebagai upaya untuk mengurangi asimetri informasi. Diferensiasi fungsional yang semakin banyak dalam Pemda maka semakin banyak gagasan, inovasi dan informasi yang ada. Akibatnya, Pemda mendapat tekanan untuk menyajikan pelaporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah ditetapkan (Suhardjanto, *et al.* 2010). Berdasarkan penjabaran di atas, dirumuskan hipotesis keempat yaitu:

*H4: Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berpengaruh positif terhadap transparansi pemerintah daerah provinsi di Indonesia*

### **Pengaruh Jumlah Temuan Audit Terhadap Transparansi Pemerintah Daerah Di Indonesia**

Temuan audit menjelaskan jumlah masalah yang terjadi selama pelaporan keuangan pemerintah daerah yang tidak memenuhi standar akuntansi yang telah ditetapkan. Berdasarkan teori institusional, BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan organisasi pemerintah memerlukan informasi dalam melakukan tugasnya yaitu pengawasan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara dalam teori *agency*, terdapat BPK sebagai pihak *principal* yang menilai akuntabilitas pemerintah daerah melalui temuan audit laporan keuangan dan pemerintah daerah sebagai *agent*, sehingga meminimalisir adanya asimetri informasi antara pemda dan BPK.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Liestiani (2008) yang dikutip dari Dhiyantiputri (2018) menunjukkan temuan audit berhubungan positif terhadap *disclosure* LKPD. Berdasarkan penjabaran tersebut, jika terdapat temuan audit BPK maka Pemda akan melakukan koreksi atau rekomendasi dari hasil audit tersebut sehingga mendorong pemda dalam pengungkapan informasi keuangannya. Oleh sebab itu, peneliti merumuskan hipotesis kelima.

*H5: Jumlah temuan audit berpengaruh positif terhadap transparansi pemerintah daerah provinsi di Indonesia*

### **Pengaruh Hasil Opini Audit Terhadap Transparansi Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia**

Hasil opini audit yang dilakukan BPK penting dalam menjelaskan transparansi pemerintah daerah karena untuk menilai seberapa wajar laporan keuangan yang dipublikasikan di laman pemerintah daerah. Hal ini selaras dengan teori institusional yang menjelaskan mengenai pengakuan oleh para *stakeholder* terhadap semua informasi yang diungkapkan oleh suatu pemerintah provinsi. Pengakuan *stakeholder* menilai hal tersebut berdasarkan dari seberapa transparan penjelasan dari penilaian audit yang dilakukan oleh BPK RI.

Penelitian Adiputra, *et al.* (2018) menunjukkan bahwa hasil opini audit yang dilakukan oleh BPK berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi Pemda di Indonesia karena semakin baik opini pemda maka kualitas pengelolaan keuangannya sudah baik. Tetapi penelitian Nainggolan dan Purwanti (2012) menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan yang diprosikan dengan hasil opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pengungkapan informasi keuangan. Dirumuskan hipotesis keenam sebagai berikut.

*H6: Hasil opini audit yang dilakukan oleh BPK berpengaruh positif terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia.*

## METODE PENELITIAN

### Variabel Penelitian

Penelitian mengenai transparansi pemerintah daerah menggunakan dua variabel dalam menguji hipotesis yang telah diajukan. Kedua variabel tersebut adalah variabel dependen dan independen. Penelitian ini menggunakan transparansi Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2016-2018 sebagai variabel dependen yang diproksikan dengan menggunakan indeks aksesibilitas yang dikembangkan oleh Styles dan Tennyson (2007) dan telah dimodifikasi sesuai dengan ketersediaan data dan peraturan di Indonesia. Indeks aksesibilitas ini merupakan indeks untuk mengukur transparansi dari tingkat aksesibilitas pada laman resmi pemerintah provinsi oleh pengguna. Sedangkan, variabel independen ukuran pemda diproksikan dengan menggunakan logaritma natural dari total aset yang dimiliki oleh setiap pemda. Variabel tingkat ketergantungan diukur dengan menggunakan perbandingan antara dana alokasi umum yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan total pendapatan (Martani. *et al*, 2014; Ratmono, 2013). Variabel jumlah penduduk dihitung dari jumlah penduduk yang terdapat pada pemerintah provinsi tersebut (Dhiyantiputri, 2018; Ratmono, 2013; Afryansyah, 2013). Variabel independen OPD diproksikan dengan jumlah dari OPD setiap pemprov (Dhiyantiputri, 2018), kemudian variabel temuan audit diukur dengan jumlah temuan audit yang ditemukan oleh BPK RI. Variabel opini audit diproksikan menggunakan variabel *dummy*, dimana skor 1 untuk opini WTP dan 0 untuk opini Non-WTP (Adiputra. *et al*, 2018).

### Penentuan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh pemerintah provinsi di Indonesia pada tahun 2016-2018 yang berjumlah 34 provinsi. Sementara penentuan sampel yaitu menggunakan metode *purposive sampling*. Metode ini menggunakan kriteria pemerintah daerah provinsi yang memiliki laman resmi dan dapat mengakses LKPD yang telah diaudit oleh BPK. LKPD juga menyajikan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK yang berisi informasi temuan audit BPK dan hasil opini audit pemerintah daerah. Kriteria sampel meliputi:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada seluruh provinsi di Indonesia yang telah diaudit oleh BPK RI pada tahun 2016-2018.
2. Pemerintah daerah yang memiliki laman resmi di internet.
3. LKPD yang menyajikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK yang berisi informasi mengenai temuan audit BPK terhadap pemerintah daerah provinsi

### Metode Analisis

Hipotesis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi data panel yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{TRANS} = \alpha + \beta_1 \text{SIZE} + \beta_2 \text{DEPEND} + \beta_3 \text{POP} + \beta_4 \text{OPD} + \beta_5 \text{FIND} + \beta_6 \text{OPINION} + \varepsilon$$

Keterangan:

$\alpha$	: Konstanta
TRANS	: Indeks aksesibilitas informasi keuangan daerah
SIZE	: Total logaritma natural dari aset.
DEPEND	: Rasio antara dana alokasi umum dengan pendapatan.
POP	: Jumlah penduduk
OPD	: Jumlah OPD
FIND	: Jumlah temuan audit



- OPINION : Variabel dummy, di mana nilai 1 untuk opini WTP dan 0 untuk opini Non WTP
- $\varepsilon$  : Error

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang telah diperoleh diketahui terdapat 33 LKPD Pemerintah Provinsi yang memenuhi kriteria penelitian, sehingga total sampel sebanyak 99 untuk 3 tahun pengamatan (2016, 2017 dan 2018).

**Tabel 1**  
**Proses Pemilihan Sampel**

Kriteria Sampel	Jumlah
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada seluruh provinsi di Indonesia yang telah diaudit oleh BPK RI pada tahun 2016-2018.	34
Pemerintah daerah provinsi yang tidak memiliki laman resmi dan yang laman resminya tidak dapat diakses secara langsung melalui internet	(1)
Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	33
<b>Jumlah sampel penelitian selama 3 tahun</b>	<b>99</b>

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Pemerintah provinsi yang memenuhi kriteria sampel selanjutnya akan diolah berdasarkan proksi yang sebelumnya telah ditentukan. Dalam lembar lampiran 1 akan disertakan statistik deskriptif variabel dependen dan pada tabel 2 dibawah ini akan dijelaskan mengenai statistik deskriptif dari variabel-variabel independen yang telah diolah sebagai berikut.

**Tabel 2**  
**Statistik Deskriptif Variabel Independen**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<b>SIZE</b>	99	24,3	33,8	29,961	1,1681
<b>DEPEND</b>	99	0	0,6	0,289	0,1567
<b>POP</b>	99	666.333	48.683.700	7.803.087,72	11.041.742,535
<b>OPD</b>	99	30	74	43,435	7,8446
<b>FIND</b>	99	4	70	18,727	10,7967
<b>OPINION</b>	99	0	1	0,949	0,2201

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Pada lampiran 1 merupakan tabel nilai indeks transparansi yang diprosikan melalui tingkat aksesibilitas laman pemerintah daerah provinsi yang dapat diakses melalui internet. Berdasarkan lampiran 1 diketahui bahwa pemerintah provinsi Kalimantan Selatan tidak mempunyai laman resmi yang dapat diakses peneliti sehingga tidak memenuhi kriteria sampel dan hanya beberapa pemerintah daerah provinsi yang menyediakan keseluruhan dari komponen LKPD pada laman resminya baik pada tahun 2016, 2017 maupun 2018. Pemerintah provinsi yang memiliki tingkat transparansi yang baik pada tahun 2016 hanya pemda Aceh, DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Sementara periode 2017 hanya pemerintah daerah DKI Jakarta dan Jawa Tengah yang memiliki tingkat transparansi 13 dan sisanya dibawah nilai tersebut. Serta pada tahun 2018 mengalami peningkatan jumlah pemprov yang menyediakan keseluruhan informasi keuangan daerah (IKD) yaitu pemerintah provinsi

Jakarta, Banten dan Jawa Tengah atau dengan kata lain lebih meningkat dari tahun 2017 yang hanya dua pemprov saja.

Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Tengah dapat dikatakan memiliki tingkat transparansi yang konsisten dari tahun ke tahun dan sudah menerapkan transparansi atas informasi keuangannya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya melalui basis teknologi informasi. Sementara laman resmi pemerintah provinsi yang lain dapat dikatakan mulai mengembangkan lamannya dan menjadikan media internet sebagai media yang dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan rata-rata persentase aksesibilitas laman resmi pemprov dari tahun 2016 hingga 2018 sebesar 52%.

Tabel 2 menggambarkan statistik deskriptif untuk kondisi setiap variabel independen dalam penelitian. Tabel diatas menunjukkan rata-rata jumlah ukuran Pemda yang diproksikan melalui logaritma natural dari jumlah aset yang dimiliki oleh Pemprov di Indonesia yaitu sebesar 29,961 asset, dengan total minimum asset sebesar 24,34 dan asset tertinggi sebesar 33,8. Variabel *DEPEND* Pemda diketahui memiliki rata-rata sebesar 0,289 (28,9%) dan dengan deviasi standar sebesar 0,1567. Sementara variabel independen *POP* yang diukur dengan menggunakan jumlah penduduk memiliki rata-rata 7.803.087,72 penduduk, penduduk tertinggi berada di provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 48.683.700 penduduk pada tahun 2018 serta terendah sebesar 666.333 yang terdapat di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2016 dan variabel jumlah penduduk ini memiliki deviasi standar sebesar 11.041.742,535.

Variabel *OPD* memiliki jumlah terendah sebesar 30 organisasi perangkat daerah. Sementara pemprov Jawa Timur memiliki jumlah perangkat daerah yang terbanyak yaitu sebanyak 74 OPD pada tahun 2016 dengan rata-rata sebesar 43 perangkat dan deviasi standar sebesar 7,8446. Variabel *FIND* diketahui memiliki nilai rata-rata temuan audit pada tahun 2016-2018 pemprov di Indonesia adalah sebesar 18,72 dan dengan deviasi standarnya sebesar 10,79. Variabel *OPINION* yang diproksikan menggunakan variabel *dummy* diketahui memiliki *mean* hasil opini audit yang diberikan oleh BPK RI kepada pemprov di seluruh Indonesia periode 2016-2018 yaitu sebesar 0,949 (94,9%) dan dengan deviasi standar sebesar 0,22. Hasil opini audit yang diproksikan menggunakan variabel *dummy* menjelaskan bahwa dengan nilai 0 maka pemprov tersebut memiliki opini non-WTP dan 1 yaitu WTP. Pemprov dengan nilai 0 yaitu terdapat pada pemprov DKI Jakarta pada tahun 2016, Kalimantan Barat pada tahun 2018 dan Maluku pada tahun 2018. Sedangkan pemprov lainnya memiliki hasil opini audit yang wajar tanpa pengecualian.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Regresi dengan Model *Fixed Effect***

Variabel	Koefisien	t	Prob.
SIZE	0.096807	0.137022	0.8915
DEPEND	1.579492	1.562605	0.1234
POP	0.000507	0.994705	0.3239
OPD	0.611682	3.640450	0.0006
FIND	-0.080782	-1.262724	0.2116
OPINION	0.140199	0.888260	0.3779
R-squared			0.901311
Adjusted R-squared			0.838808
F-statistic			14.42030
Prob (F-statisic)			0.000000

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa dalam model regresi memenuhi asumsi *BLUE* (*Best Linear Unbiased Estimator*). Berdasarkan hasil uji asumsi, dalam model penelitian ini tidak terdapat masalah uji asumsi klasiknya sehinggamenenuhi asumsi *BLUE*. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi data panel yaitu *Pooled Least Square*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Fixed Effect Model* ini digunakan dalam penelitian ini karena memiliki koefisien regresi ( $R^2$ ) yang konstan dari waktu ke waktu.

Hasil uji pada hipotesis pertama menunjukkan bahwa ukuran Pemda tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi. Dengan kata lain, hipotesis ukuran Pemda ditolak dan tidak menentukan suatu pemerintah provinsi dalam melakukan transparansi informasi keuangan. Hasil ini berkebalikan dengan Styles and Tennyson (2007), Medina (2012) dan Martani, *et al.* (2014). Meskipun demikian, hasil ini selaras dengan penelitian sebelumnya yaitu oleh Nainggolan dan Purwanti (2012), Adiputra, *et al.* (2018), Ratmono (2013) dan Hilmi dan Martani (2010) yang menyimpulkan ukuran pemerintah di Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi pada laman resmi pemerintah karena menurut Hilmi dan Martani (2010) menjelaskan dengan jumlah aset besar yang dimiliki oleh pemerintah menyebabkan Pemda condong mempunyai kualitas manajemen aset yang kurang baik serta memperoleh catatan dari BPK. Tetapi seringkali Pemprov tidak mempunyai informasi yang cukup berkaitan dengan kasus yang dihadapi sehingga hal tersebut menyebabkan ukuran Pemda tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan di laman resminya.

Hipotesis kedua ditolak dalam menguji tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap transparansi. Hasil pengujian variabel *DEPEND* pada tabel 3 menyatakan terdapat hubungan positif tidak signifikan terhadap transparansi (*TRANS*). Menurut Liestiani (2008) yang dikutip dari Khasanah (2014) menjelaskan tingkat ketergantungan tidak berpengaruh pada transparansi karena pemerintah pusat kurang memberikan kontrol atas pengelolaan dana yang telah diberikan kepada pemerintah daerah sehingga Pemda belum memiliki dorongan untuk meningkatkan transparansi informasi keuangannya melalui laman resmi pemerintah provinsi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2014) dan Hilmi dan Martani (2010) dan berkebalikan dengan penelitian Ratmono (2013), Martani, *et al.* (2014) dan Guillamón, *et al.* (2011) yang membuktikan bahwa ada pengaruh antara tingkat ketergantungan pemerintah daerah dengan transparansi informasi keuangan di laman pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga yaitu jumlah penduduk terbukti berhubungan positif tetapi tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan sampel yang diteliti, *mean* dari *POPULATION* yang besar seharusnya berbanding lurus dengan jumlah pengguna informasi yang terdapat di internet termasuk mengetahui informasi mengenai keuangan daerah di laman resmi pemda. Hasil penelitian ini mendukung riset Ingram (1984), Laswad, *et al.* (2005) dan Afryansyah dan Haryanto (2013) yang menunjukkan jumlah penduduk berpengaruh positif tetapi tidak signifikan pada transparansi informasi keuangan provinsi. Hasil penelitian ini bertentangan dengan Medina (2012), Hilmi dan Martani (2010), García (2010) dan Styles dan Tennyson (2007) yang menjelaskan *POPULATION* berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan daerah.

Pengujian terhadap hipotesis keempat memiliki nilai positif signifikan yang menunjukkan bahwa variabel jumlah OPD tersebut mempengaruhi tingkat transparansi pemerintah daerah dalam penyediaan informasi keuangannya. Hasil penelitian ini jika dihubungkan dengan *agency theory* yaitu menjelaskan mengenai tugas dari agen selaku pemerintah berkewajiban untuk menyediakan informasi yang simetris kepada prinsipal dalam hal ini dimaksudkan publik. Semakin besar jumlah OPD maka tingkat transparansi informasi keuangan pemerintah akan semakin baik. Hal ini dikarenakan OPD selaku



pengelola laman resmi pemda akan melakukan publikasi pengungkapan informasi keuangannya di internet dan pengungkapan informasi keuangan akan semakin baik serta laman resmi Pemda semakin diperbaharui dengan adanya jumlah OPD yang banyak.

Penelitian ini selaras dengan Patrick (2007) dan Khasanah (2014), menurut Patrick (2007) menjelaskan bahwa suatu pemerintah daerah akan membutuhkan adanya bantuan banyak anggota organisasi didalam keberlangsungan pemerintahannya. Secara mudah dapat diasumsikan bahwa kerjasama dan koordinasi dari berbagai organisasi atau departemen dalam pemerintahan. Namun, penelitian ini bertentangan dengan dan Hilmi (2010) yang memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan atas jumlah OPD terhadap pengungkapan informasi keuangan di laman resmi pemerintah daerah. Dengan demikian, adanya jumlah OPD yang banyak maka akan memperbaiki laman resmi pemda dalam proses pembaharuan informasi sehingga informasi yang disampaikan akan simetris dan publik mengetahui bahwa semua informasi terbaru mengenai keuangan pemerintah daerah serta mengurangi adanya asimetri informasi.

Variabel *FIND* berhubungan negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat transparansi informasi keuangan daerah pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2016-2018. Oleh karena itu, hipotesis kelima tingkat temuan audit ditolak karena tidak sesuai dengan hipotesis awal bahwa *FIND* berpengaruh positif terhadap transparansi pada laman resmi pemerintah. Hal ini diperoleh berdasarkan data penelitian yang telah diolah bahwa *FIND* tidak berpengaruh signifikan karena dengan semakin sedikitnya temuan dari BPK belum mampu untuk mendorong Pemda dalam transparansinya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Khasanah (2014) yang menemukan bahwa temuan audit BPK berhubungan negatif dan tidak signifikan. Khasanah (2014) menjelaskan bahwa hasil negatif variabel temuan audit menjelaskan dengan sedikit temuan maka semakin baik pengungkapan informasi keuangannya. Sementara itu, pengaruh yang tidak signifikan disebabkan karena pemerintah provinsi yang belum memproses pengurangan asimetri informasi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan *agency theory*.

Pengaruh hasil audit oleh BPK terhadap LKPD provinsi memiliki hubungan positif tidak signifikan sehingga hipotesis keenam ditolak. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dapat terlihat bahwa hampir semua pemerintah provinsi telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian tetapi masih terdapat beberapa Pemprov yang masih memiliki opini wajar dengan pengecualian. Hal ini tidak mempengaruhi tingkat transparansi dikarenakan pemprov telah memiliki kemampuan yang baik dalam pembuatan laporan keuangannya, yang mana LKPD tersebut akan diperiksa oleh BPK dan telah tercantum dalam hasil pemeriksaannya. Opini audit memiliki arah hubungan yang positif dikarenakan opini dapat mempengaruhi penilaian dari *stakeholder* terhadap pemerintah tetapi tidak terlalu mempengaruhi tingkat kemudahan dalam transparansi informasi keuangan pemerintah daerah provinsi.

Berdasarkan *institutional theory*, opini LKPD adalah salah satu faktor yang mempengaruhi prinsipal atau publik dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Hasil audit yang diberikan BPK adalah cerminan ketepatan laporan dengan SAP dan Standar Akuntansi Keuangan. Dengan demikian, semakin baik kinerja pemerintah seharusnya publikasi melalui laman resmi pemerintah daerah juga semakin baik (Nainggolan dan Purwanti, 2012). Hasil penelitian ini selaras dengan Nainggolan dan Purwanti (2012), Ratmono (2013) dan Hilmi (2010) yang mengungkapkan opini tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi informasi finansial. Sedangkan riset ini bertentangan dengan Adiputra, *et al.* (2018) yang menyatakan kualitas laporan keuangan yang diukur dengan opini audit BPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah.

## KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dari enam variabel yang diuji, hanya terdapat 1 variabel independen yang diterima dan menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap variabel dependen penelitian yaitu jumlah OPD dari kategori kompleksitas pemerintah. Variabel independen lainnya seperti ukuran pemerintah, tingkat ketergantungan, jumlah penduduk, jumlah temuan dan opini audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi informasi keuangan daerah pemerintah provinsi di Indonesia melalui laman resminya periode 2016-2018. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah OPD yang semakin banyak akan mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan keterbukaan informasi keuangannya melalui laman resminya masing-masing.

Penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya sampel penelitian ini hanya terbatas pada pemerintah provinsi di Indonesia saja, sehingga diharapkan penelitian berikutnya dapat menambah jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian. *Kedua*, Faktor-faktor yang diuji belum sepenuhnya menjelaskan variabel dependen transparansi informasi keuangan daerah. *Ketiga*, kemungkinan terdapat kecenderungan pemerintah daerah dalam memperbaiki informasi keuangannya di laman resmi karena pembaharuan sistem dan sebagainya. *Keempat*, hasil uji penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel independen jumlah OPD yang dapat menjelaskan variabel dependen transparansi informasi keuangan daerah. *Kelima*, peneliti hanya mengakses laman pemprov pada bulan Desember 2019-Februari 2020 sehingga pembaharuan informasi keuangan pemprov dapat tidak dapat diketahui dan hasil tabulasi dari data penelitian dapat berubah pula.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, maka saran yang diberikan peneliti yaitu disarankan untuk menggunakan objek yang lebih luas lagi yaitu meliputi Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia. Selain itu, diharapkan juga untuk dapat menambahkan variabel-variabel lain dalam menjelaskan variabel dependen transparansi informasi keuangan daerah seperti kompetisi politik masing-masing daerah, tingkat *leverage* dan *press visibility*. Penelitian ini menggunakan proksi *index accessibility* untuk mengukur variabel dependen tingkat transparansi, penelitian berikutnya diharapkan dapat menggunakan proksi lain sehingga dapat digunakan sebagai pembandingan dalam pengujian penelitian sebelumnya.

## REFERENSI

- Adiputra, I.M.P., S. Utama, H. Rossieta . (2018). *Transparency of local government in Indonesia*. *Asian Journal of Accounting Research*, Vol. 3, No. 1, h.123–138
- Afryansyah, R. D dan Haryanto. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi Di Internet Oleh Pemerintah Daerah. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi Di Internet Oleh Pemerintah Daerah*, Vol. 2 No.3, h. 702–712
- Carpenter, V. L., & Feroz, E. H. (2001). *Institutional theory and accounting rule choice: An analysis of four US state governments' decisions to adopt generally accepted accounting principles*. *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 26. No. 7–8, h. 565–596
- Dhiyantiputri, S. 2018. "Determinan Luas Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014-2016". *Disertasi yang Tidak Dipublikasikan*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro

- García, A.G. dan Garcia, J.G. (2010). *Determinants of online reporting of accounting information by Spanish local government authorities. Local Government Studies*, Vol. 36, No. 5, h. 679–695
- Guillamón, M.D. F. Bastida dan B. Benito. 2011. *The determinants of local government's financial transparency. Local Government Studies*, Vol. 37, No. 4, h. 391–406
- Hilmi A. Z dan Martani, D. 2010. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi". *Simposium Nasional Akuntansi XV*, h. 1–26.
- Ingram, R. W. 1984. *Economic Incentives and the Choice of State Government Accounting Practices University of Chicago Stable Journal of Accounting Research*, Vol. 22 No. 1, h. 126–144.
- Khasanah. 2014. Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 3, No. 2, h. 864–874.
- Laswad, F., Fisher, R. dan Oyelere, P. 2005. *Determinants of voluntary Internet financial reporting by local government authorities. Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 24, No. 2, h. 101–121.
- Martani, D., Fitriyani, D. dan Annisa. 2014. *Financial and performance transparency on the local government websites in Indonesia. Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, Vol. 60, No. 3, h. 504–516.
- Medina, F. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Website Resmi Pemerintah Daerah dDi Indonesia, Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Universitas Indonesia.
- Nainggolan, A.T. dan Purwanti, D. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website, h. 1–26.
- Patrick, P. A 2007. "The Determinants of Organizational Innovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government". *Disertasi Tidak Dipublikasikan*, The Pennsylvania State University, PA.
- Purwanti, R.E., Akram dan Suparman, L. 2017. *The Determinants Transparency And Accessibility Of Internet Financial Reporting. International Conference and Call for Papers*, h. 378–394.
- Ratmono, D. 2013. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet: Pengujian Teori Institusional dan Keagenan. *Media Ilmiah Akuntansi*, Vol. 51, h. 28–48.
- Republik Indonesia (2005), Peraturan Pemerintah Nomor 56, Tentang Sistem Informasi Keuangan daerah
- Republik Indonesia (2008), Undang-Undang Nomor 14, Tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Styles, A. dan Tennyson, M. (2007). *The Accessibility Of Financial Reporting Of U.S. Municipalities On The Internet. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol.19, No. 1, h. 194–200.

Suhardjanto, D. dan Yulianingtyas, R.R. 2010. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Lalporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)”. h. 30–42.

Referensi website:

<https://www.suara.com/news/2019/04/25/000500/aji-pemerintah-jakarta-paling-tidak-transparan-di-indonesia>

Diakses tanggal 25 September 2019 pukul 21.44

**LAMPIRAN****Lampiran 1. Nilai Indeks Transparansi Informasi Keuangan Daerah pada Laman Resmi 34 Pemda Pada Tahun 2016-2018**

No	Provinsi	Nilai TRANS		
		2016	2017	2018
1	Provinsi Aceh	13	13	12
2	Provinsi Sumatera Utara	4	4	4
3	Provinsi Sumatera Barat	5	5	10
4	Provinsi Riau	6	6	6
5	Provinsi Kepulauan Riau	4	4	4
6	Provinsi Jambi	10	4	4
7	Provinsi Sumatera Selatan	4	4	9
8	Provinsi Bangka Belitung	9	9	4
9	Provinsi Bengkulu	3	3	9
10	Provinsi Lampung	5	4	4
11	Provinsi DKI Jakarta	13	13	13
12	Provinsi Jawa Barat	12	12	12
13	Provinsi Banten	12	12	12
14	Provinsi Jawa Tengah	13	13	13
15	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	5	5	9
16	Provinsi Jawa Timur	10	10	10
17	Provinsi Bali	4	4	7
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	12	12	12
20	Provinsi Kalimantan Utara	4	11	12
21	Provinsi Kalimantan Barat	11	11	11
22	Provinsi Kalimantan Tengah	3	3	3
23	Provinsi Kalimantan Selatan	0	0	0
24	Provinsi Kalimantan Timur	7	9	9
25	Provinsi Sulawesi Utara	4	4	4
26	Provinsi Sulawesi Barat	4	4	4
27	Provinsi Sulawesi Tengah	4	4	4
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	4	4	4
29	Provinsi Sulawesi Selatan	4	4	4
30	Provinsi Gorontalo	4	4	4
31	Provinsi Maluku	4	4	4
32	Provinsi Maluku Utara	4	4	4
33	Provinsi Papua Barat	4	4	4
34	Provinsi Papua	4	4	9